# BAB V
# PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

## 5.1. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah Kota Batu dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Batu yang disampaikan kepada masyarakat ketika proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam menterjemahkan visi kedalam misi, visi diuraikan terlebih dahulu mengenai pokok-pokok yang terkandung didalam visi. Kemudian pokok-pokok visi tersebut dijelaskan mengenai kesesuaiannya dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah. Selain itu, juga dijabarkan mengenai kriteria keberhasilan dan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program-program pembangunan dari masing-masing pokok visi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD harus terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu. Keterkaitan ini dimaksudkan menjaga kesinambungan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, pokok-pokok visi juga harus memiliki rujukan dari sasaran pokok dalam RPJPD.

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi

| No. | Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, | Kota Batu menjadi sentra pertanian organik. | <u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u><br>Visi ini mengantisipasi isu kerusakan tanah, lingkungan hidup, serta kondisi iklim dan cuaca. Di sisi lain, visi ini berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan melalui dukungan sektor pertanian organik terhadap sektor pariwisata. |
| | | | <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u><br>a. Kondisi kesuburan tanah di Kota Batu secara umum bisa dikatakan mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk dan pestisida |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. | | kimia yang terus-menerus sekian lama ini. Dengan adanya (pokok) visi berkaitan dengan pertanian organik, maka diharapkan penggunaan pupuk organik dapat memulihkan kondisi kesuburan tanah. Sehingga dengan kembalinya kesuburan tanah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian (organik).<br>b. Luasan lahan pertanian di Kota Batu bisa dikategorikan terbatas. Permasalahan keterbatasan lahan ini harus disiasati dengan cara menaikkan nilai produknya, bukan kuantitas produk. Sehingga, harus dipilih kategori produk yang nilai jualnya tinggi. Komoditas pertanian bernilai jual tinggi adalah komoditas pertanian organik. Oleh karenanya, pertanian organik diharapkan dan diasumsikan dapat meningkatkan nilai pendapatan sektor pertanian dengan keterbatasan luasan lahan pertanian.<br>c. Pola pikir petani yang menginginkan percepatan masa panen yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan pupuk kimia.<br>d. Pola pikir petani yang lebih memilih varietas bibit unggul yang berumur pendek yang notabene merupakan jenis bibit yang haus hara. |
| | | | <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u><br>Kota Batu memiliki potensi dan keunggulan di sektor pertanian/perkebunan yang sudah cukup dikenal masyarakat luas baik dari sisi produk pertanian/ perkebunannya maupun pertanian/perkebunan yang mendukung pariwisata. |
| | | | <u>Kriteria Keberhasilan</u><br>Aspek manajemen :<br>a. Ditetapkannya kawasan pertanian organik sesuai potensi sumber daya lahan.<br>b. Tersusunnya master plan dan rencana aksi pengembangan kawasan sentra pertanian organik.<br>c. Terbitnya dokumen kesepakatan lintas sektoral pengembangan kawasan sentra pertanian organik.<br>d. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan sentra pertanian organik.<br>Aspek Teknis<br>a. Meningkatnya produktivitas dan produksi komoditas pertanian organik.<br>b. Meningkatnya aktivitas pasca panen dan kualitas produksi.<br>c. Meningkatnya aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk.<br>d. Meningkatnya jaringan pemasaran komoditas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | e. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha komoditas.<br>f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.<br>g. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, pasar input output, teknologi, dan informasi. |
| | | | <u>Indikator Keberhasilan</u><br>a. Produktivitas produk pertanian organik per hektar.<br>b. Kontribusi sektor pertanian (organik) terhadap PDRB.<br>c. Cakupan bina kelompok tani.<br>d. Nilai tukar petani. |
| | | | <u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u><br>Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar. |
| | | Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik. | <u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u><br>a. Visi ini mengarahkan pembangunan menuju kondisi masa depan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, yaitu keunggulan pariwisata. Peningkatan status kepariwisataan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.<br>b. Pengelolaaan pariwisata yang lebih menarik diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor pertanian organik dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, karena wisatawan yang berkunjung dapat menjadi segmen pasar dari hasil produk pertanian organik.<br>c. Pengelolaan pariwisata yang lebih baik dan bijaksana juga diharapkan dapat mengatasi (isu) kerusakan lingkungan, karena keunggulan (wisata) alam akan mendorong upaya pemeliharaan secara optimal. |
| | | | <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> pembangunan daerah Kota Batu, yaitu bahwa:<br>a. Sejumlah desa masih memiliki kendala dalam pembangunan pengembangan desa. Dengan adanya konsep “Desa Wisata”, maka arah pembangunan akan menuju kepada pengembangan desa. Dapat dikatakan dengan menggunakan satu strategi dua tujuan tercapai. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Dinamika pembangunan daerah yang cukup tinggi membawa dampak negatif yang memungkinkan atau dapat merugikan potensi daerah. Potensi Kota Batu adalah keunggulan kondisi alam yang indah, udara yang sejuk, dan air yang melimpah. Tetapi potensi itu bisa rusak jika tidak dilindungi oleh misi yang benar-benar fokus mempertahankan sektor kepariwisataan.<br>c. Sektor pertanian juga rentan terhadap dinamika pembangunan. Lahan pertanian Kota Batu yang termasuk kategori tidak luas sangat rentan beralih fungsi menjadi bukan lahan pertanian. Misi ini secara tidak langsung memperkuat fungsi lahan pertanian agar tetap digunakan sebagaimana fungsinya. |
| | | | <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u><br>Kota Batu memiliki kharakteristik kondisi geografis yang mendukung kepariwisataan. Pemandangan yang indah, hawa yang sejuk, sumber daya hutan yang menarik, dan sumber daya air yang melimpah merupakan potensi yang berpeluang untuk diberdayakan semaksimal mungkin secara bijaksana menjadi wisata alam yang menarik. Selain itu, Kota Batu yang juga memiliki keunggulan di sektor pertanian memiliki potensi dan peluang untuk memaksimalkan wisata agro yang cukup diminati oleh wisatawan. |
| | | | <u>Kriteria Keberhasilan</u><br>Aspek manajemen :<br>a. Tersusunnya master plan dan rencana aksi obyek wisata baru yang mendukung misi kepariwisataan internasional antara lain Asean Culture Park, Desa Wisata, Kereta Gantung, dan Drive In.<br>b. Tersedianya kawasan, sarana prasarana, dan alokasi anggaran pengembangan kepariwisataan internasional.<br>c. Terbitnya dokumen dasar hukum pengembangan kepariwisataan internasional.<br>Aspek Teknis<br>a. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha kepariwisataan.<br>b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di sektor kepariwisataan maupun sektor lain yang mendukung.<br>c. Meningkatnya jejaring kepariwisataan.<br>d. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Indikator Keberhasilan<br>a. Jumlah kunjungan wisata.<br>b. Jumlah wisatawan manca Negara yang berkunjung.<br>c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. |
| | | | Rujukan Sasaran Pokok RPJPD<br>a. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata.<br>b. Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha. |
| | | Sektor pendidikan yang mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu. | Relevansi dengan Kebutuhan Daerah<br>Seiring dengan potensi Kota Batu dalam sektor pertanian dan pariwisata, Kota Batu masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meneruskan dan mengembangkan kualitas potensi pertanian dan pariwisata. Diluar kedua sektor tersebut, Kota Batu masih memiliki potensi usaha kecil menengah dan industri yang masih menyediakan kesempatan kerja cukup luas. |
| | | | Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah<br>Permasalahan di sektor pendidikan yang terjadi di Kota Batu adalah masih tingginya jumlah anak putus sekolah, jenjang pendidikan masih relatif rendah, dan angka meneruskan sekolah juga masih rendah. Permasalah ini disebabkan karena faktor ketidakmampuan ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang arti penting pendidikan. |
| | | | Relevansi dengan Potensi Daerah<br>Kota Batu sudah memiliki potensi, keunggulan, dan arah pembangunan di sektor pertanian organik dan kepariwisataan. Dua sektor tersebut sudah terbukti mampu mengangkat kondisi perekonomian daerah. Sehingga, output dari sektor pendidikan berupa sumber daya manusia memiliki peluang untuk masuk ke dalam dua sektor unggulan Kota Batu dengan syarat bahwa SDM output dari sektor pendidikan benar-benar berkompeten terhadap bidang pertanian maupun olahannya, dan pariwisata. |
| | | | Kriteria Keberhasilan<br>Aspek manajemen :<br>a. Tersedianya data kependidikan secara lengkap dan terbaru. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Terwujudnya kurikulum pendidikan unggulan (pertanian dan pariwisata) yang dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan formal maupun non formal.<br>c. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan pendidikan secara umum maupun pendidikan vokasi.<br>Aspek Teknis<br>a. Meningkatnya jumlah lulusan peserta didik.<br>b. Meningkatnya jumlah lulusan peserta didik yang terserap dalam kesempatan kerja di dalam maupun di luar Kota Batu.<br>c. Meningkatnya jumlah lulusan peserta yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. |
| | | | <u>Indikator Keberhasilan</u><br>a. Angka Partisipasi Sekolah.<br>b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan.<br>c. Angka Kelulusan.<br>d. Angka Putus Sekolah.<br>e. Angka Melanjutkan. |
| | | | <u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u><br>a. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.<br>b. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan non formal.<br>c. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan.<br>d. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| | | Sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dikelola secara baik. | <u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u><br>a. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya alam (terutama hutan dan air) dengan lebih baik karena kedua sumber daya ini merupakan penopang keunggulan geografis yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Sumber daya hutan terutama berfungsi menopang kesejukan udara, sedangkan sumber daya air menopang pasokan air bagi Kota Batu dan beberapa kota di sekitarnya.<br>b. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik karena sumber daya manusia (dalam hal ini masyarakat) merupakan obyek pembangunan dan juga sekaligus sebagai subyek pembangunan. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan sangat bergantung kepada faktor sumber daya manusia, baik dalam konteks proses pembangunannya maupun dalam penciptaan iklim |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | atau situasi lingkungan.<br>c. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya budaya dengan lebih baik dalam rangka mempertahankan dan melestarikan keberadaan kebudayaan daerah yang dimiliki, yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi satu sajian budaya yang dapat mendukung sektor pariwisata. |
| | | | <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u><br>a. Dalam hal sumber daya alam, permasalahan yang terjadi adalah sudah mulai tercemarnya dan mengalami proses keruasakan dua sumber daya alam utama di Kota Batu, yaitu sumber daya hutan dan air. Keduanya memiliki fungsi strategis yaitu menjaga kesejukan udara dan menyediakan pasokan air untuk masyarakat Kota Batu dan sekitarnya.<br>b. Dalam hal sumber daya manusia, permasalahan yang terjadi adalah Kota Batu adalah masih banyaknya kasus yang terkait dengan kependudukan, pengangguran, ketenagakerjaan, kesehatan, kepemudaan, keadilan, kesejahteraan, sosial, dan lain sebagainya.<br>c. Dalam hal sumber daya budaya, permasalahan yang terjadi adalah mulai terpinggirkannya budaya daerah yang disebabkan pengaruh budaya asing dan berkurangnya ketertarikan generasi muda kepada kebudayaan daerah. Padahal kebudayaan daerah merupakan aset atau kekayaan daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan tidak ternilai harganya. |
| | | | <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u><br>a. Potensi sumber daya alam Kota Batu adalah keberadaan hutan, sumber mata air, tipe geografi alam, dan udara yang sejuk merupakan sebuah potensi yang sangat mendukung pengembangan berbagai sektor secara serempak dan dapat saling mendukung, dimana kondisi alam ini tidak dimiliki oleh banyak kota lain.<br>b. Potensi sumber daya manusia Kota Batu adalah masyarakat Kota Batu yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang mendukung stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga menunjang pembangunan daerah yang tetap berpegang kepada nilai nilai kearifan lokal.<br>c. Potensi sumber daya budaya Kota Batu adalah keberadaan budaya daerah baik yang berwujud kesenian daerah maupun nilai-nilai kearifan lokal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang sebetulnya menjadi kharakter masyarakat yang memiliki nilai kekhasan tersendiri. |
| | | | <u>Kriteria Keberhasilan</u><br>Aspek manajemen :<br>a. Dibuatnya perencanaan program terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya.<br>b. Tersedianya alokasi anggaran pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya.<br>c. Ditetapkannya peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya.<br>Aspek Teknis<br>a. Terwujudnya kondisi sumber daya alam yang lestari.<br>b. Terwujudnya sumber daya manusia yang lebih berdaya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan diri.<br>c. Terwujudnya stabilitas kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam kehidupan masyarakat. |
| | | | <u>Indikator Keberhasilan</u><br>a. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.<br>b. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia.<br>c. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya budaya. |
| | | | <u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u><br>a. Kesehatan.<br>b. Ketenagakerjaan.<br>c. Kepemudaan dan olahraga.<br>d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<br>e. Keluarga sejahtera.<br>f. Kependudukan.<br>g. Sosial.<br>h. Kesatuan bangsa politik dan ketahanan masyarakat.<br>i. Budaya. |
| | | Pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif, dan inovatif. | <u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u><br>Kota Batu memiliki kebutuhan untuk menata pengelolaan dan kinerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan kota yang baik dan bersih, serta mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. |
| | | | <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u><br>a. Tidak ada atau kurangnya aktivitas perekaman atau pencatatan hasil capaian kerja dan kondisi riil masyarakat secara berkelanjutan dan terkini. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Ketidakmerataan penyebaran tugas pekerjaan yang menyebabkan penumpukan pekerjaan di satu pihak, tetapi terjadi kekosongan pekerjaan di pihak lain.<br>c. Lemahnya fungsi kepemimpinan di tingkat SKPD yang mengakibatkan lemahnya kinerja staf.<br>d. Lemahnya fungsi koordinasi yang menimbulkan hambatan dalam berjalannya sebuah proses pekerjaan.<br>e. Kurangnya evaluasi terhadap hasil kerja sehingga secara berantai mengakibatkan hasil kerja-hasil kerja yang kurang kualitasnya.<br>f. Kurangnya fungsi pengawasan dan penerapan sanksi terhadap tindakan indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. |
| | | | <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u><br>Pemerintahan Kota Batu memiliki jumlah aparatur yang cukup banyak dengan latar belakang pendidikan yang cukup memadai. Lima puluh persen lebih aparatur masih berusia muda, sehingga secara kekuatan fisik, pikir, dan semangat kerja seharusnya masih cukup tinggi. Potensi ini seharusnya dapat memacu tumbuhnya kreatifitas dan inovasi kerja para pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan daerah. |
| | | | <u>Kriteria Keberhasilan</u><br>Aspek manajemen :<br>a. Ditetapkannya dasar hukum reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.<br>b. Tersusunnya rencana program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam.<br>c. Tersedianya alokasi anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.<br>d. Terselenggaranya evaluasi berkala terhadap hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.<br>Aspek Teknis<br>a. Meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan.<br>b. Meningkatnya kedisiplinan dari aparatur.<br>c. Meningkatnya kedisiplinan, motivasi, inisiatif, dan resposifitas kerja.<br>d. Berjalannya sistem pengembangan dan pembinaan pegawai dengan baik.<br>e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Indikator Keberhasilan<br>a. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.<br>b. Sistem informasi manajemen pemerintah daerah dengan data yang valid dan terbaru yang merekam semua program kegiatan pengelolaan pemerintahan.<br>c. Buku “Kota Batu dalam Angka”. |
| | | | Rujukan Sasaran Pokok RPJPD<br>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.<br>b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan.<br>c. Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan.<br>d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan.<br>e. Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<br>f. Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah.<br>g. Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.<br>h. Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan sampai pemberhentian pegawai.<br>i. Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan.<br>j. Terciptanya aparatur pengawasan yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi.<br>k. Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah daerah.<br>l. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.<br>m. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. | Relevansi dengan Kebutuhan Daerah<br>Kota Batu membutuhkan terjalinnya kemitraan, kerjasama, dan kepercayaan dari semua elemen masyarakat dan pemerintah dalam bersama-sama mencapai tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan, kerjasama, dan kepercayaan yang merupakan modal sosial ini hanya bisa terwujud jika ada keharmonisan yang melandasi perilaku setiap stakeholder. Landasan keagamaan dan kearifan lokallah yang digunakan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. |
| | | | Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah<br>a. Nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu sudah mulai tercampur dan terkikis oleh nilai kehidupan budaya luar. Tercampurnya dan pengikisan nilai ini dikarenakan mudahnya informasi nilai budaya luar yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan degradasi moral masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat.<br>b. Heterogenitas masyarakat di Kota Batu yang cukup tinggi membawa konsekuensi heterogenitas nilai masyarakat. Perbedaan nilai dari heterogenitas masyarakat ini rentan menimbulkan terjadinya konflik sosial, dimana konflik-konflik kecil pastilah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Agar tidak berubah menjadi konflik besar, maka sekecil apapun konflik yang terjadi harus dapat dikelola dengan baik, dan lebih baik untuk melakukan tindakan pencegahan, salah satunya melalui nilai keagamaan dan kearifan lokal yang bersifat universal. |
| | | | Relevansi dengan Potensi Daerah<br>a. Masyarakat Kota Batu memiliki latar belakang keagamaan yang beragam. Keberagaman ini memberi nuansa dalam kehidupan bermasyarakat.<br>b. Di Kota Batu terdapat beberapa lembaga pengembangan keagaaman yang cukup besar cakupan wilayahnya, yang keberadaannya ikut mengangkat nama Kota Batu di kota atau negara lain. Selain itu, keberadaan lembaga pengembangan keagamaan tersebut juga memberi peluang kunjungan masyarakat kota atau negara lain ke Kota Batu. |
| | | | Kriteria Keberhasilan<br>Aspek manajemen :<br>a. Terfasilitasinya Forum Kerukunan Umat Beragama dan lembaga-lambaga sosial keagamaan yang ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dalam masyarakat.<br>b. Teridentifikasinya nilai kearifan lokal yang akan diinternalisasi kepada masyarakat.<br>c. Terwujudnya materi dan sarana proses internalisasi nilai.<br>d. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan nilai keagamaan dan kearifal lokal.<br>Aspek Teknis :<br>a. Terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan keagamaan, sosial dan politik masyarakat.<br>b. Terwujudnya perilaku masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai keagamaan dan kearifan lokal.<br>c. Terwujudnya situasi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. |
| | | | Indikator Keberhasilan<br>a. Angka kriminalitas.<br>b. Jumlah demo.<br>c. Rasio KDRT. |
| | | | Rujukan Sasaran Pokok RPJPD<br>a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.<br>b. Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan.<br>c. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat. |

*Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan*

## 5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi harus memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi, dan misi perlu untuk dikaji dan dianalisis sehubungan dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi misi. Faktor-faktor tersebut dibedakan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan.

Rumusan misi bertujuan untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batu, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 5.2.

Perumusan Penjelasan Misi

| No. | Pokok-Pokok Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Batu menjadi sentra pertanian organik. | Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Adanya dukungan pemerintah kota dalam pengembangan pertanian organik.<br>b. Kelemahan<br>1) Luasan lahan pertanian yang terbatas.<br>2) Kondisi kesuburan tanah yang berkurang.<br>3) Pola pikir masyarakat petani yang masih cenderung pada pertanian non organik.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Masih besarnya peluang pasar penjualan produk pertanian organik.<br>2) Penguatan penjualan produk olahan dari komoditas pertanian baik organik maupun non organik.<br>b. Tantangan<br>1) Kurangnya daya tarik pekerjaan di sektor pertanian.<br>2) Cuaca ekstrim.<br>3) Penyakit dan hama pertanian.<br>4) Kenyataan bahwa dampak penggunaan pupuk organik pada tahun awal justru menurunnya jumlah produksi pertanian akibat proses perbaikan kondisi tanah.<br>5) Mahalnya harga komoditas pertanian organik menyebabkan kesulitan pemasaran bagi masyarakat Kota Batu.<br>6) Kemungkinan yang besar terjadi alih fungsi lahan pertanian. |
| 2 | Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik. | Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Kepariwisataan Kota Batu yang sudah cukup dikenal luas dan diminati.<br>2) Kondisi alam yang cukup indah dengan hawa yang sejuk membuat Kota Batu cukup nyaman untuk tempat peristirahatan.<br>3) Adanya dukungan pemerintah kota dalam pengembangan kepariwisataan internasional.<br>4) Sudah terbentuk jaringan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik dari dalam maupun luar Kota Batu.<br>5) Kesiapan sektor usaha pengolahan makanan dalam kemasan dan souvenir atau kerajinan yang mendukung sektor pariwisata. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Kelemahan<br>1) Gerak pembangunan pemerintah kota di sektor lain yang kurang atau tidak bersinergi dengan pembangunan sektor pariwisata.<br>2) Kurangnya bentuk-bentuk sajian budaya yang justru menjadi minat dari wisatawan asing.<br>3) Kurang memadainya infrastruktur jalan yang terlihat dari terjadinya kemacetan disaat masa-masa liburan, ketika banyak wisatawan yang masuk ke Kota Batu.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Keberadaan budaya tradisional yang dimiliki oleh Kota Batu, berpeluang untuk dikembangkan dan dikemas secara apik sehingga memiliki nilai jual dalam paket wisata Kota Batu.<br>b. Tantangan<br>1) Dinamika pembangunan fisik yang dapat merusak atau mengganggu kondisi alam yang indah dan sejuk. |
| | | Optimalisasi investasi daerah. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Kemudahan perijinan.<br>2) Kemudahan pasokan listrik.<br>3) Jumlah penduduk Kota Batu yang cukup besar, sehingga memberi kemudahan mendapatkan tenaga kerja.<br>4) Stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat.<br>b. Kelemahan<br>1) Benturan kepentingan investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.<br>2) Sempitnya ruang atau lahan yang dapat digunakan untuk investasi mengingat hampir 60% wilayah Kota Batu sebagai wilayah hutan.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Jumlah kunjungan wisata yang cukup banyak dengan peningkatan yang cukup signifikan merupakan daya tarik penilaian investor akan nilai strategis investasi di Kota Batu.<br>b. Tantangan<br>1) Persaingan pemerintah daerah di sekitar Kota Batu dan di Jawa Timur serta nasional yang menjadikan pariwisata dan agrobisnis sebagai unggulan daerah menimbulkan tantangan dalam merebut minat investor untuk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berinvestasi.<br>2) Berkembangnya spekulan tanah dan proyek dari luar Kota Batu yang menyebabkan daerah target wisata menjadi bernilai tinggi bagi investor sehingga mengurangi minat investor untuk melakukan investasi. |
| | | Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Tersedianya lahan dan anggran untuk pengembangan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas.<br>2) Ketersediaan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu.<br>b. Kelemahan<br>1) Kurangnya pemahaman dari aparatur pelaksana terhadap kebijakan terkait pembangunan fasilitas fisik, diantaranya kebijakan tentang proses pengadaan tanah dan pencairan dana.<br>2) Terjadinya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diluar perencanaan.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Banyaknya pengembang yang sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi terkait dengan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas.<br>b. Tantangan<br>1) Perubahan yang sering terjadi terhadap peraturan terkait pengadaaan barang jasa dan pembiayaannya mengakibatkan perlunya upaya untuk penyesuaian kembali. |
| 3 | Sektor pendidikan yang mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu. | Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Rasio jumlah guru dan murid sudah mencukupi.<br>2) Rasio jumlah guru dan kelas sudah mencukupi.<br>3) Persebaran guru telah merata di seluruh wilayah Kota Batu.<br>4) Biaya pendidikan terutama untuk pendidikan dasar sudah dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.<br>b. Kelemahan<br>1) Jumlah guru tersertifikasi masih terbatas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2) Jumlah guru yang berpendidikan sarjana, master, dan doktor masih terbatas.<br>3) Jumlah guru profesional masih terbatas.<br>4) Jumlah sekolah terakreditasi masih terbatas.<br>5) Program pengembangan kompetensi guru di tingkat nasional dan internasional masih belum banyak.<br>6) Tingkat kesenjangan kualitas lembaga pendidikan masih tinggi.<br>7) Tenaga pendidik yang spesialisasi keahlian di bidang pariwisata dan pertanian masih terbatas.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Adanya program beasiswa pendidikan dari lembaga luar pemerintahan kota.<br>2) Adanya program sertifikasi guru dari pemerintahan pusat.<br>b. Tantangan<br>1) Peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Malang Raya menyebabkan calon guru yang berkualitas lebih suka bekerja di luar Kota Batu. |
| 4 | Sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dikelola secara baik. | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Ketersediaan data capaian kinerja yang cukup akurat dan terbaru.<br>2) Biaya jaminan kesehatan utamanya masyarakat miskin sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.<br>3) Jumlah puskesmas dan rumah sakit telah mencukupi.<br>4) Jumlah dokter umum dan tenaga paramedis sudah mencukupi.<br>5) Terjaminnya ketersediaan obat oleh pemerintah daerah.<br>b. Kelemahan<br>1) Jumlah dokter spesialis masih terbatas<br>2) Kecenderungan pilihan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan cenderung masih memilih pelayanan kesehatan di Kota Malang.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Minat investor untuk berinvestasi di bidang kesehatan (seperti apotik, klinik, dan lain-lain) di Kota Batu.<br>b. Tantangan<br>1) Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | menyebabkan pasien dari Kota Batu yang lebih suka menggunakan pelayanan kesehatan di luar Kota Batu. |
| | | Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Cukup berkembangnya eksistensi koperasi-koperasi di Kota Batu.<br>2) Adanya dukungan pemerintah dalam hal bantuan permodalan terhadap koperasi dan UKM.<br>b. Kelemahan<br>1) Lemahnya permodalan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pelaku usaha kecil menengah.<br>2) Lemahnya pengawasan terhadap kualitas produk.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Kecanggihan teknologi informasi memberikan peluang pemasaran yang cukup murah dengan cakupan wilayah pemasaran yang sangat luas.<br>b. Tantangan<br>1) Iklim persaingan usaha yang semakin berat.<br>2) Melemahnya daya beli masyarakat secara global. |
| | | Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Stabilitas politik di kota Batu yang cukup kondusif.<br>2) Hubungan yang harmonis antara partai politik dan kekuatan politik masyarakat.<br>3) Partisipasi masyarakat cukup tinggi.<br>4) Adanya kelembagaan pembina sosial politik di kota Batu.<br>b. Kelemahan<br>1) Belum terjadi kesepahaman bersama terkait dengan pengaturan pelayanan pariwisata dengan nilai-nilai di masyarakat.<br>2) Tingkat pendidikan politik masyarakat Kota Batu yang masih rendah.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Lembaga-lembaga sosial politik di luar Kota Batu telah banyak yang melakukan kegiatan peningkatan demokratisasi masyarakat.<br>b. Tantangan<br>1) Sifat dinamika kehidupan Kota Batu yang terbuka melalui wisatawan domestik dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | asing menyebabkan pengaruh cukup tinggi terhadap kehidupan politik Kota Batu. |
| 5 | Pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif, dan inovatif. | Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Jumlah aparatur pemerintahan yang sudah memadai.<br>2) Kebutuhan aparatur yang akan menduduki jabatan tertentu berdasarkan pangkat sudah cukup memadai.<br>b. Kelemahan<br>1) Kurang verifikasi penerimaan aparatur pemerintah dari daerah asal yang melakukan mutasi ke Kota Batu, sehingga kurang diketahui secara jelas track record dan profesionalitas di daerah asal.<br>2) Masih banyaknya aparatur Kota Batu yang berdomisili di Kota Batu sehingga menghambat kinerja.<br>3) Belum dimilikinya perkantoran yang representatif dan terintegrasi sehingga menghambat proses kerja.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Reformasi birokrasi menjadi agenda nasional.<br>2) Adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.<br>3) Adanya panduan Standart Pelayanan Minimal<br>b. Tantangan<br>1) Dominasi politik dalam mempengaruhi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh birokrasi.<br>2) Perilaku pihak swasta (pemilik modal) yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. |
| | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Jumlah aparatur pemerintahan Desa sudah memadai.<br>2) Tersedia anggaran hibah bantuan pengembangan desa yang memedai untuk mendanai prakarsa aktif pembangunan masyarakat desa.<br>3) Telah dimiliki kantor yang representatif untuk pemerintahan desa<br>4) Pembinaan pelayanan dan pemerintahan desa telah terlembaga di pemerintahan kota.<br>b. Kelemahan<br>1) Lemahnya kemampuan manajemen dan administrasi aparatur pemerintahan desa.<br>2) Belum disertifikasinya standarisasi kualitas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pelayanan pemerintahan desa.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Bantuan pengembangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan propinsi tersedia langsung bagi masyarakat dan pemerintah desa.<br>b. Tantangan<br>1) Adanya pihak-pihak luar yang mempengaruhi pola perilaku aparatur pemerintahan desa untuk mencari keuntungan pribadi, |
| 6 | Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. | Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama. | <u>Faktor Internal</u><br>a. Kekuatan<br>1) Banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dalam komunitas sosial maupun keagamaan masyarakat.<br>2) Adanya forum kerukunan antar umat beragama di Kota Batu.<br>3) Terdapat lembaga pendidikan agama dari berbagai agama yang berkembang pesat di Kota Batu.<br>4) Terdapat pusat pendidikan dan pusat peribadatan berskala nasional yang menjadi pusat kunjungan umat agama dari berbagai daerah dan menjadi penggiat kerukunan antar umat beragama.<br>b. Kelemahan<br>1) Pola dan metode penyampaian pemahaman agama masih tradisional kurang menarik bagi generasi muda.<br>2) Belum ada peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama.<br><u>Faktor Eksternal</u><br>a. Peluang<br>1) Keterbukaan informasi dari tingkat nasional dan internasional untuk pendidikan keagamaan menunjang peningkatan pemahaman keagamaan<br>2) Besarnya perhatian dari lembaga keagamaaan tingkat nasional dan internasional terhadap Kota batu melalui pusat peribadatan yang ada di Kota Batu.<br>b. Tantangan<br>1) Banyaknya siswa dari luar Kota Batu yang belajar pada lembaga pendidikan keagamaan di Kota Batu, memungkinkan terjadi perbedaan pandangan tentang kerukunan agama di kota Batu.<br>2) Perkembangan pariwisata dan tekhnologi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | internet membawa pengaruh materialism dan liberalism terhadap generasi muda yang membahayakan akidah keagamaan. |

*Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan*

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan upaya melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah menuju program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanpa adanya tujuan dan sasaran, visi dan misi kepala daerah akan sangat sulit dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak yang diharapkan terwujud sebagai bentuk keberhasilan pembangunan daerah. Yang dimaksud tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 5.3.

Rumusan Sasaran dan Indikator

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik. | Mewujudkan pertanian organik berwawasan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. | Terwujudnya sistem bertani organik.<br><br>Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan.<br><br>Terwujudnya produk pertanian organik. | Jumlah paket pengembangan kawasan organik.<br><br>Jumlah paket pelatihan pertanian organik. |
| | | | Terwujudnya kemantapan proses pengembangan pertanian organik.<br><br>Terwujudnya diversifikasi pertanian organik. | Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik. |
| | | Mewujudkan perdagangan hasil pertanian organik. | Terwujudnya pasar induk agribisnis. | Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian. |
| | | | Terwujudnya penguatan agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif. | Ketersediaan informasi produksi pertanian/ perkebunan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Terwujudnya penguatan aspek pasar. | Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM) |
| | | | Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian. | Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM) |
| | | | Terwujudnya akses informasi pasar komoditas pertanian yang lebih luas. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani. |
| 2 | Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional. | Mewujudkan Kota Batu menjadi kota tujuan pariwisata internasional. | Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata.<br><br>Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional.<br><br>Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu.<br><br>Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi dan profesional. | Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata.<br><br>Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata.<br><br>Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional.<br><br>Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional.<br><br>Jumlah kunjungan wisata.<br><br>Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA.<br><br>Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.<br><br>Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata.<br><br>Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan. |
| 3 | Optimalisasi investasi daerah. | Mengoptimalkan investasi daerah ke arah peningkatan kesejahtaraan masyarakat. | Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada.<br><br>Masuknya investor baru ke Kota Batu.<br><br>Berkembangnya kerjasama | Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM)<br><br>Cakupan informasi berbagai potensi sumber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri.<br><br>Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan.<br><br>Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat. | daya unggulan daerah.<br><br>Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM)<br><br>Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM)<br><br>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM)<br><br>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM)<br><br>Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM) |
| | | | Tersusunnya kebijakan investasi daerah. | Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM) |
| | | Membentuk keterpaduan antara pemerintah, pengusaha, dan | Meningkatnya kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pekerja dalam proses kerja. | Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM)<br><br>Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM) |
| | | | Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.<br><br>Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja.<br><br>Meningkatnya kesejahteraan pekerja. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM)<br><br>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM)<br><br>Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM)<br><br>Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM) |
| 4 | Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas. | Memperlancar dan mendukung kinerja pemerintah, proses pembangunan kota, aktifitas perekonomian, dan segala aspek kehidupan masyarakat. | Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota. | Persentase penyelesaian gedung perkantoran pemerintah dalam satu area perkantoran. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri. | Persentase penyelesaian pembangunan SD Negeri.<br>Persentase penyelesaian pembangunan SMA Negeri. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur kesehatan. | Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan. | Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur keolahragaan. | Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur perdagangan. | Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan.<br><br>Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL). |
| | | | Terwujudnya infrastruktur pertanian. | Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Terwujudnya infrastruktur perindustrian. | Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). |
| | | | Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan. | Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK). |
| | | | Terwujudnya fasilitas bina sosial. | Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur pariwisata. | Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan rest area.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan Drive In.<br><br>Persentase penyelesaian pengembangan jalur festival wisata.<br><br>Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike. |
| | | | Terwujudnya infrastruktur jalan.<br><br>Terwujudnya akses lalu lintas antar wilayah.<br><br>Meningkatnya dinamika masyarakat melalui ketersediaan sarana mobilisasi yang lebih baik. | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM)<br><br>Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM)<br><br>Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM) |
| | | | Terwujudnya infrastruktur transportasi. | Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan terminal tipe B.<br><br>Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas. | Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM)<br><br>Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM) |
| | | | Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman. | Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. (SPM)<br><br>Persentase penduduk yg memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan.<br><br>Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (SPM)<br><br>Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. (SPM)<br><br>Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM)<br><br>Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan. (SPM) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan. | Membentuk sumber daya manusia pendidik yang berkompeten dan beretika. | Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan. | Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik.<br><br>Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik.<br><br>Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik. |
| | | | Meningkatnya etika dari para pendidik. | Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik.<br><br>Jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik yang tertangani. |
| | | Mewujudkan lembaga pendidikan yang benar-benar mengedepankan upaya membentuk anak didik yang berkualitas secara keilmuan, bermoral dan berakhlak mulia. | Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul. | Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.<br><br>Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).<br><br>Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).<br><br>Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll)<br><br>Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.<br><br>Persentase jumlah SMP/ MTsyang telah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).<br><br>Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).<br><br>Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll). |
| | | | Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul. | Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.<br><br>Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).<br><br>Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).<br><br>Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) |
| | | | Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang mendukung potensi dan keunggulan Kota Batu.<br><br>Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan. | Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal. |
| | | | Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal. | Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).<br><br>Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).<br><br>Persentase jumlah SD/MI yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.<br><br>Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.<br><br>Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. |
| 6 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. | Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualias, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. | Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan. | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. |
| | | | Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. | Cakupan kunjungan puskesmas. |
| | | | Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs)<br><br>Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian. |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. | Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM)<br><br>Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM)<br><br>Cakupan desa/ kelurahan UCI. (SPM)<br><br>Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM)<br><br>Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM)<br><br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM)<br><br>Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM)<br><br>Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM)<br><br>Cakupan kunjungan bayi. (SPM)<br><br>Cakupan peserta KB aktif. (SPM)<br><br>Cakupan pelayanan anak balita. (SPM)<br><br>Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM)<br><br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM)<br><br>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM)<br><br>Persentase lansia yang dilayani.<br><br>Persentase puskesman santun lansia.<br><br>Cakupan pemberian makanan pendamping |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM)<br><br>Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM)<br><br>Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan.<br><br>Persentase TTU/TPM sehat.<br><br>Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs) |
| | | | Meningkatnya kesehatan lingkungan. | Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs)<br><br>Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs) |
| | | Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya keluarga berencana. | Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana.<br><br>Meningkatnya reproduksi sehat.<br><br>Terwujudnya keluarga berencana sejahtera. | Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM)<br><br>Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM)<br><br>Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%.<br><br>Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM)<br><br>Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM)<br><br>Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM)<br><br>Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)<br><br>Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM)<br><br>Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.<br><br>Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. |
| 7 | Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM. | Mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui usaha kecil menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM. | Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif.<br><br>Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs)<br><br>Jumlah mitra kerja yang menjadi pendaping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) |
| | | | Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya. | Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke kecil.<br><br>Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan.<br><br>Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional. |
| | | | Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM. | Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan.<br><br>Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mengentaskan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari keterpurukan sosial melalui sektor UKM. | Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS.<br><br>Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS.<br><br>Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok. | Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM) |
| | | Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Menengah Kecil (KUMKM) dalam mendorong keberdayaan UKM. | Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. | Jumlah lembaga koperasi aktif. |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna. | Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan. |
| | | | Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional. | Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional. |
| | | Meningkatkan peran semua industri kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Batu. | Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata. | Jumlah KUB industri hulu hilir.<br><br>Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah. |
| | | | Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri kecil | Jumlah KUB yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi. |
| 8 | Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis. | Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpolitik bertanggung-jawab sesuai koridor hukum yang berlaku dengan senantiasa berpegang pada semangat kebangsaan dan sikap saling menghormati. | Meningkatnya iklim demokrasi.<br><br>Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamanaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi.<br><br>Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik.<br><br>Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata. | Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.<br><br>Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik.<br><br>Jumlah pembinaan terhadap partai politik. |
| | | Mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat. | Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum. | Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan. | Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan.<br><br>Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan. |
| | | | Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan. | Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM)<br><br>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan. (SPM) |
| 9 | Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. | Mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai organisasi birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance). | Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah sesuai dengan nilai yang disepakati, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata. | Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.<br><br>Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.<br><br>Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan.<br><br>Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah.<br><br>Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.<br><br>Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PIM II & prajabatan.<br><br>Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan.<br><br>Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan. |
| | | | Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala. | Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini.<br>Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah.<br><br>Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada.<br><br>Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perkada.<br><br>Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan.<br><br>Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan.<br><br>Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran. |
| | | | Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi. | Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.<br><br>Tingkat kesesuaian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD.<br><br>Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.<br><br>Persentase jumlah aparatur pemeriksa dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.<br>Persentase jumlah aparatur pemeriksa dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.<br><br>Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.<br><br>Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur.<br><br>Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur.<br><br>Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.<br><br>Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. |
| | | | Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja. | Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.<br><br>Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.<br><br>Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. |
| | | | Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja. | Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah.<br><br>Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa. |
| | | | Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi. | Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.<br><br>Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.<br><br>Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya. |
| | | Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. | Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan. | Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN.<br><br>Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN.<br><br>Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN.<br><br>Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN.<br><br>Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN.<br><br>Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN.<br><br>Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN. |
| 10 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. | Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atas berbagai kepentingan publik masyarakat. | Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa.<br><br>Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat. | Persentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. |
| | | | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa. | Jumlah sarana prasarana kerja bagi pemerintahan desa. |
| | | | Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah. | Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah.<br><br>Pendampingan ADD.<br><br>Pelantikan BPD.<br><br>Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa. |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa. | Jumlah desa yang telah menerapkan standar pelayanan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama. | Mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing.<br><br>Terwujudnya sikap dan perilaku rukun dan gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat. | Persentase pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat.<br><br>Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. |
| | | | Terwujudnya nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bernegara. | Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah. |
| | | | Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama. | Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB). |
| | | | Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai. | Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB. |
| | | Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya Indonesia agar tetap menjiwai Bangsa Indonesia. | Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. | Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat. |

*Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.*